



**DETERMINAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Muhammad Bagus Putratsalaatsa

NIM 7111415086

EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

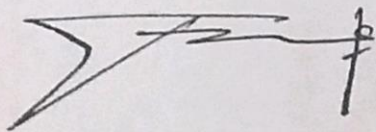
Hari : Senin

Tanggal : 13 April 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pembimbing



Fafurida S.E., M.Sc.

NIP. 198502162008122004



Dr. Amin Pujiati S.E., M.St.

NIP. 196908212006042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 April 2020

Penguji I

Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si.

NIP. 196812091997022001

Penguji II

Karsinah, S.E., M.Si.

NIP. 197010142009122001

Penguji III

Dr. Amin Pujiati S.E., M.Si.

NIP. 196908212006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

DINNES Yanto, MBA, PH.D
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bagus Putratsalaatsa

NIM : 7111415086

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Desember 1996

Alamat : Jl. Kanguru Utara Raya No. 15 Kota Semarang

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 28 April 2020



Muhammad Bagus Putratsalaatsa

NIM. 7111415086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.” – Emha Ainun Nadjib

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, (Alm) Bapak Basir Arintoko dan Ibu Sumaryati yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan doa untuk penulis
2. Almamater Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Determinan Investasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, semangat, dan nasihat yang diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi.
3. Fafurida S.E, M.Sc., sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang memberikan izin observasi dan penelitian.
4. Dr. Amin Pujiati S.E.,M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat, dan saran dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, serta seluruh staff yang telah membantu selama proses studi di kampus.

6. Seluruh pimpinan dan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi.
7. Sahabat serta teman teman penulis dari Ekonomi Pembangunan 2015 yang telah memberikan semangat dan saling membantu dalam proses penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Putratsalaatsa, Muhammad Bagus. 2020. “Determinan Investasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Amin Pujiati S.E.,M.Si.

Kata kunci: Determinan, Investasi, Tipologi Klassen, Regresi Logistik Multinomial

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan investasi di Jawa Tengah tahun 2014-2018, mengklasifikasikan setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan realisasi investasi, dan faktor yang mempengaruhi investasi di Jawa Tengah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Investasi, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional dan Indeks Harga Konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section dan time series dari tahun 2014-2018 yang bersumber dari DPMPTSP Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi Klassen dan Regresi Logistik Multinomial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang mempengaruhi investasi yaitu variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap investasi. (2) Pada klasifikasi daerah maju tumbuh cepat faktor yang mempengaruhi investasi yaitu angkatan kerja dan upah minimum regional, kemudian untuk klasifikasi daerah maju tertekan faktor yang mempengaruhi investasi yaitu angkatan kerja dan klasifikasi daerah potensial berkembang cepat faktor yang mempengaruhi investasi yaitu angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia. (3) Ketepatan klasifikasi sebesar 47,4% dan model tersebut telah sesuai namun karena nilai klasifikasi memiliki nilai yang rendah maka ada indikasi variabel prediktor dan jumlah data yang digunakan relatif sedikit..

Ketidakmerataan investasi di Jawa Tengah cenderung berpusat pada beberapa daerah. Pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan yang pro investasi dan penguatan spesialisasi tiap-tiap daerah. Rekomendasi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel prediktor yang lebih lengkap yang tidak digunakan pada penelitian ini yang kemungkinan dapat meningkatkan ketepatan klasifikasi.

ABSTRACT

Putratsalaatsa, Muhammad Bagus. 2020. "Determinant of Investment in Regency / City of Central Java Province in 2014-2018". Final Project. Department of Development Economics. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor. Pembimbing: Dr. Amin Pujiati S.E.,M.Si.

Keywords: Determinant, Investment, Klassen Typology, Multinomial Logistics Regression

The purpose of this study was to analyze the determinants of investment in Central Java in 2014-2018, classifying each district / city in Central Java based on investment realization, and the factors influencing investment in Central Java.

The variables used in this study are Investment, Labor, Human Development Index, Regional Minimum Wage and Consumer Price Index. The data used in this study are cross section and time series data from 2014-2018 sourced from DPMPTSP Central Jawa and BPS. The method used in this study is Klassen Typology and Multinomial Logistic Regression.

The results showed that: (1) Factors affecting investment, namely the labor force variable significantly influence investment. (2) In the classification of developed regions fast-growing factors affecting investment are the labor force and regional minimum wages, then for the classification of developed regions depressed factors affecting investment namely the labor force and the classification of potential areas of fast developing factors affecting investment namely the labor force and development index human. (3) The classification accuracy is 47.4% and the model is suitable but because the classification value has a low value, there are indications of predictor variables and the amount of data used is relatively small.

Inequality in investment in Central Java tends to center on several regions. The government must implement policies that are pro-investment and strengthen the specialization of each region. Future researchers' recommendations are expected to use more complete predictor variables that are not used in this study which might improve classification accuracy.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Cakupan Masalah	14
1.4. Perumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II	17
2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory).....	17
2.2. Konsep Ketimpangan Wilayah.....	19
2.3. Teori Ketimpangan Wilayah	21
2.4. Teori Lokasi.....	21
2.5. Investasi.....	23
2.6. Analisis Tipologi Klassen.....	24
2.7. Angkatan Kerja.....	24
2.8. Indeks Pembangunan Manusia	25
2.9. Upah Minimum Regional	26
2.10. Indeks Harga Konsumen	27
2.11. Penelitian Terdahulu.....	29
2.12. Kerangka Pemikiran	32

BAB III	35
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	35
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	35
3.2.1. Populasi	35
3.2.2. Sampel.....	35
3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel	36
3.3. Operasional Variabel Penelitian	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
3.5.1. Tipologi Klassen.....	40
3.5.1. Analisis Regresi Logistik Multinomial	41
BAB IV	45
4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	45
4.1.1. Perkembangan Investasi di Jawa Tengah.....	45
4.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah	47
4.1.3. Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Tengah	48
4.1.4. Perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah	50
4.1.5. Perkembangan UMR di Jawa Tengah.....	51
4.1.6. Perkembangan IHK di Jawa Tengah.....	52
4.2. Klasifikasi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan Tipologi Klassen.....	53
4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Jawa Tengah	57
4.3.1. Analisis Regresi Logistik Multinomial.....	57
4.3.2. Hubungan Jenis Investasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan Variabel-Variabel Prediktor	58
4.3.3. Permodelan Investasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	59
4.4. Pembahasan	65
4.4.1. Klasifikasi Daerah Investasi di Provinsi Jawa Tengah	65
4.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Jawa Tengah	66
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Dalam Persen)	5
Tabel 1.2. Investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Dalam Rp. Juta)	7
Tabel 1.3. Investasi PMA menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Dalam US\$).....	9
Tabel 2.1. Kelompok dan Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen	28
Tabel 4.1. Hasil Tipologi Klassen Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 ...	54
Tabel 4.2. Hasil Uji Independensi	58
Tabel 4.3. Hasil Uji Parsial (Uji Wald)	60
Tabel 4.4. Hasil Uji Keseuaian Model	63
Tabel 4.5. Ketepatan Klasifikasi Model	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 1.2. Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	11
Gambar 1.3. Upah Minimum Provinsi dan Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	12
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis	33
Gambar 4.1. Perkembangan Realisasi PMA di Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	46
Gambar 4.2. Perkembangan Realisasi PMDN di Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	47
Gambar 4.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	48
Gambar 4.4. Perkembangan Angkatan Kerja Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	49
Gambar 4.5. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	50
Gambar 4.6. Perkembangan UMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	51
Gambar 4.7. Perkembangan IHK Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2014-2018.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Beberapa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan bertujuan untuk memperbaiki investasi di Indonesia. Pembangunan ekonomi suatu negara membutuhkan investasi yang digunakan untuk kegiatan produksi dan akan menghasilkan barang atau jasa (Hermayeni, Sisca, 2015:1).

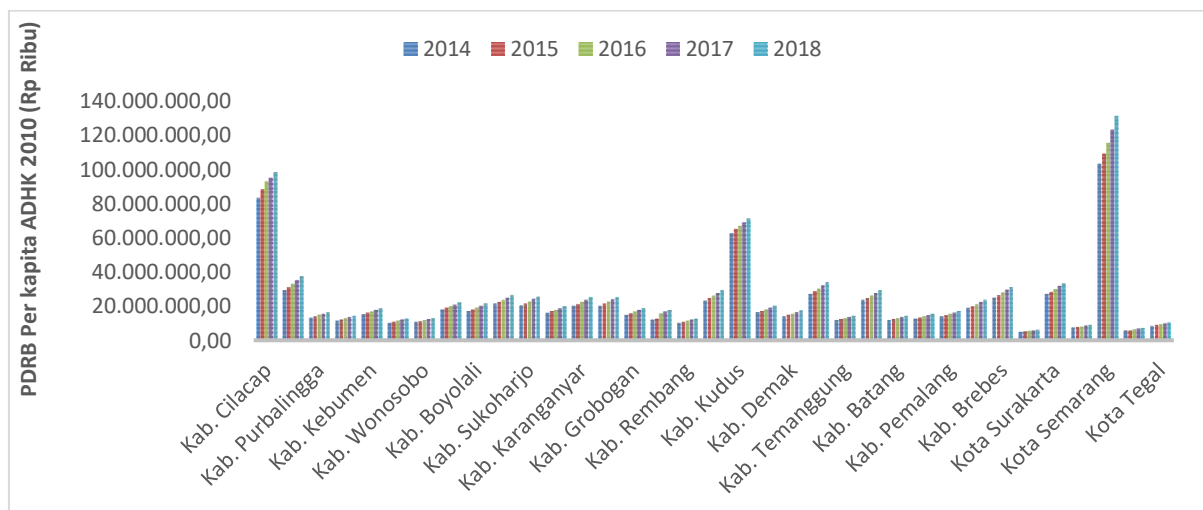
Melalui kebijakan tentang investasi menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah pro terhadap investasi di Indonesia. Pada paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan yang terakhir yaitu jilid XI (red. April 2016) mengenai kebijakan investasi seperti mendorong investasi properti, kemudahan dalam perizinan investasi di kawasan industri serta lamanya perizinan yang relatif singkat, insentif kemudahan investasi di daerah Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) (Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2016). Berdasarkan berita resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa adanya reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia tersebut membuat tingkat kepercayaan para investor terhadap Indonesia meningkat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan investasi. Potensi daerah yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik daerah masing-masing menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Tinggi atau rendahnya

pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten/kota akan berdampak pada tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah di tingkat atasnya (Mayanti, Susi, 2015:32).

Penting bagi setiap negara dapat menarik investasi sebanyak mungkin, tidak hanya negara terbelakang dan negara berkembang tetapi juga negara maju. Berbagai macam upaya dilakukan oleh suatu negara agar investasi dapat masuk sebanyak mungkin (Situmorang, 2014:5). Peran penting investasi dalam pembangunan ekonomi yaitu investasi merupakan salah satu komponen akhir dalam perspektif ekonomi makro yang menjadi indikator keseimbangan internal pada situasi keseimbangan pasar dan mencerminkan dunia usaha karena sumber investasi adalah dunia usaha. Peran penting investasi menjadikannya penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (*engine of growth*) (Situmorang, 2014:4).

Sebagai negara berkembang, Indonesia beberapa tahun terakhir terus berupaya melakukan pembangunan, dengan wilayah geografis yang besar dan berbagai permasalahan daerah, memunculkan masalah tidak meratanya pembangunan antar daerah atau yang biasa kita kenal dengan istilah ketimpangan. Menurut para ahli masalah ketimpangan pasti akan selalu ada pada semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Pemerintah selaku pengambil kebijakan diharapkan bisa menekan nilai ketimpangan serendah mungkin. Ketimpangan wilayah dan pembangunan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Hal ini diindikasikan karena terjadinya ketidakmerataan jumlah investasi. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan ketimpangan ini (Sirojuzilam, 2008:37).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, peran pemerintah daerah untuk membangun daerahnya lebih baik dengan harapan seluruh masyarakat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadikan perbedaan proses pembangunan antardaerah. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2008:104). PDRB per kapita yang semakin besar mendiskripsikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dan bila PDRB per kapita semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk kesejahteraan di daerah tersebut (Wahyuntari, 2018:298).



Gambar 1.1. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2019, diolah

Berdasarkan data gambar 1.1. dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2014-2018

menunjukkan perubahan yang terus meningkat. Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten yang memiliki PDRB terendah di Provinsi Jawa Tengah. Ketidakmerataan dapat dipengaruhi adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah maju dan daerah tertinggal (Wahyuntari, 2018:298). Tujuan diadakannya otonomi daerah adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan pemerataan pendapatan. Kebijakan otonomi daerah dicanangkan untuk mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kemandirian sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah karena mereka lebih mengetahui kebutuhan daerahnya (Muin, Fatkhul, 2014:71).

Investasi terbukti secara empiris sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Maryaningsih, 2014:94). Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 25/2007 tentang penanaman modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal meliputi: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (b) menciptakan lapangan pekerjaan; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (e) meningkatkan kapasitas kemampuan teknologi nasional; (f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan (h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditulis Basri dalam (Soekarni, 2010:17) kalau investasi dikatakan sebagai “makanan bergizi”, tentu sumber-sumber pertumbuhan lain tidaklah sebaik investasi. Konsumsi belanja pemerintah dan ekspor juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, tidak hanya

investasi. Akan tetapi, pengaruh investasi lebih besar dan lebih kuat terhadap perkembangan ekonomi dibandingkan sumber pertumbuhan lain (Soekarni, 2010:11). Hal ini didukung oleh penelitian (Prasetyo, 2009) mengenai pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Akumulasi kapital atau investasi dinyatakan sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan sejak dari teori ekonomi pembangunan neoklasik hingga teori-teori ekonomi pembangunan kontemporer (Sarungu, 2008). Sudah banyak penelitian yang meneliti bahwa akumulasi kapital atau investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Sutawijaya, 2010:25) yang berjudul pengaruh ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1980-2006 juga menjelaskan adanya pengaruh positif baik PMA ataupun PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Sjafii, 2009:73) yang berjudul pengaruh investasi fisik dan investasi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 1990-2004 juga memberikan hasil yang positif dan signifikan bahwa investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Dalam Persen)

NO	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Cilacap	2.92	5.96	5.09	2.59	3.05
2	Kabupaten Banyumas	5.67	6.12	6.05	6.34	6.45
3	Kabupaten Purbalingga	4.85	5.47	4.85	5.37	5.42
4	Kabupaten Banjarnegara	5.31	5.47	5.44	5.65	5.67
5	Kabupaten Kebumen	5.79	6.28	5.01	5.13	5.52
6	Kabupaten Purworejo	4.48	5.33	5.15	5.31	5.32
7	Kabupaten Wonosobo	4.78	4.67	5.36	3.88	4.94
8	Kabupaten Magelang	5.38	5.18	5.39	5.31	5.43
9	Kabupaten Boyolali	5.42	5.96	5.33	5.80	5.72
10	Kabupaten Klaten	5.84	5.30	5.17	5.33	5.57

NO	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
11	Kabupaten Sukoharjo	5.40	5.69	5.72	5.76	5.82
12	Kabupaten Wonogiri	5.26	5.40	5.25	5.32	5.41
13	Kabupaten Karanganyar	5.22	5.05	5.40	5.77	5.98
14	Kabupaten Sragen	5.59	6.05	5.77	5.97	5.75
15	Kabupaten Grobogan	4.07	5.96	4.51	5.85	5.91
16	Kabupaten Blora	4.39	5.36	23.54	5.98	4.40
17	Kabupaten Rembang	5.15	5.50	5.28	6.26	5.90
18	Kabupaten Pati	4.64	6.01	5.49	5.66	5.74
19	Kabupaten Kudus	4.43	3.88	2.54	3.21	3.24
20	Kabupaten Jepara	4.81	5.10	5.06	5.39	5.85
21	Kabupaten Demak	4.29	5.93	5.09	5.82	5.37
22	Kabupaten Semarang	5.85	5.52	5.30	5.65	5.79
23	Kabupaten Temanggung	5.03	5.24	5.02	4.87	5.07
24	Kabupaten Kendal	5.14	5.21	5.56	5.84	5.50
25	Kabupaten Batang	5.31	5.42	5.03	5.55	5.72
26	Kabupaten Pekalongan	4.95	4.78	5.19	5.44	5.76
27	Kabupaten Pemalang	5.52	5.58	5.43	5.65	5.77
28	Kabupaten Tegal	5.03	5.49	5.92	5.38	5.51
29	Kabupaten Brebes	5.30	5.98	5.11	5.71	5.31
30	Kota Magelang	4.98	5.11	5.23	5.42	5.59
31	Kota Surakarta	5.28	5.44	5.35	5.70	5.75
32	Kota Salatiga	5.57	5.17	5.27	5.65	5.51
33	Kota Semarang	6.31	5.82	5.89	6.55	6.52
34	Kota Pekalongan	5.48	5.00	5.36	5.32	5.69
35	Kota Tegal	5.04	5.45	5.49	5.95	5.92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah

Masuknya investasi akan sangat memberikan dampak yang baik bagi pembangunan suatu daerah, maka diperlukan peran pemerintah dalam upaya menarik investor-investor untuk datang. Menurut Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi mempunyai korelasi positif dengan laju pertumbuhan ekonomi. Jika investasi suatu daerah tidak berkembang, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang mampu menarik investor (Soekarni, 2010:9).

Tabel 1.2. Investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018 (Dalam Rp. Juta)

NO	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Cilacap	1.301.721,2	20.950.972,5	1.891.225,7	101.760,3	4.805.118,20
2	Kabupaten Banyumas	23.105	7.949.381,2	803.703,8	1.438.934,1	614.635,30
3	Kabupaten Purbalingga	41.900	31.794	28.262,4	90.897,2	9.103,80
4	Kabupaten Banjarnegara	384.998	43.251,9	117.132,4	395.321	148.609,10
5	Kabupaten Kebumen	234.435,2	350.785,9	144.915,7	537.374,9	71.422,60
6	Kabupaten Purworejo	103.319	29.054,5	120.003,1	298.138	113.205,00
7	Kabupaten Wonosobo	141.138,3	75.813	412.365,7	356.438	16.125,30
8	Kabupaten Magelang	151.670,8	0	479.750	194.859,1	125.480,30
9	Kabupaten Boyolali	1.035.090,9	753.144,3	1.022.126,8	489.603,2	1.113.601,20
10	Kabupaten Klaten	25.000	401.071,5	89.208,5	334.295,6	229.788,50
11	Kabupaten Sukoharjo	1.133.729,8	986.934,8	784.360,5	3.101.119,8	1.107.151,30
12	Kabupaten Wonogiri	548.791,7	7.752.781,3	987.046,4	6.806.485,7	42.569,20
13	Kabupaten Karanganyar	948.999,3	1.919.046	1.371.542	6.035.776,1	989.035,40
14	Kabupaten Sragen	101.699,7	1.506.673,7	275.661,7	872.525	2.441.479,00
15	Kabupaten Grobogan	627.618	2.960.091,9	4.082.817,6	202.059,7	215.708,80
16	Kabupaten Blora	500	2.211.000	5.745.382,5	209.353,8	13.246,20
17	Kabupaten Rembang	3.757.560,8	139.311	564.742,8	340.680,4	427.814,80
18	Kabupaten Pati	342.168,9	4.842.500,1	948.092,5	134.672,8	106.167,70
19	Kabupaten Kudus	4.217.787,2	281.212	8.701.054,4	1.921.298,9	687.187,70
20	Kabupaten Jepara	85.617,6	172.310,7	423.667,9	476.237,9	8.365,10
21	Kabupaten Demak	1.785.633,1	855.797,4	521.354,6	3.793.763,9	463.882,80
22	Kabupaten Semarang	2.173.694,2	3.232.225,1	1.268.151,5	2.732.004,6	2.141.898,60
23	Kabupaten Temanggung	200.178	539.629	85.840,4	134.722,6	93.391,00

NO	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
24	Kabupaten Kendal	5.343.416	77.064,6	164.671,3	763.288	311.708,40
25	Kabupaten Batang	99.848	7.235.256,6	114.179	885.459,1	544.148,60
26	Kabupaten Pekalongan	102.823,5	153.008,1	302.265,4	7.006.029,5	1.241.009,10
27	Kabupaten Pemalang	0	79.772,2	42.170,4	1.728.851,6	103.357,80
28	Kabupaten Tegal	0	56.159,4	225.425,8	248.271,9	59.570,20
29	Kabupaten Brebes	80.000	0	343.895,2	205.083,1	67.550,80
30	Kota Magelang	0	39.053	0	171.470,4	12.966,20
31	Kota Surakarta	0	41.519,1	368.857,7	1.223.973,5	383.298,80
32	Kota Salatiga	137.500	167.326	106.935,3	73.283,6	121.931,20
33	Kota Semarang	274.450	774.637,6	1.074.014,2	2.168.929,3	8.534.747,90
34	Kota Pekalongan	37.886	53.770,7	15.571,1	155.450	96.123,00
35	Kota Tegal	21.847,9	0	123.401,9	77.800	13.494,70
TOTAL		25.464.128,10	66.662.349,10	33.749.796,20	45.706.212,60	27.474.893,60

Sumber : DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah

Melihat dari data tabel 1.2 persebaran investasi PMDN yang ada di Provinsi Jawa Tengah 5 tahun terakhir tampak tidak merata, Kab. Cilacap menjadi kawasan paling tinggi menerima akumulasi modal sebesar 16,76% dari total investasi PMDN di Jawa Tengah, kemudian Kab. Wonogiri dengan 8,71% dan Kab. Grobogan dengan 8,22%. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kekurangan alokasi investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk kondisi persebaran investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.3. Investasi PMA menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Dalam US\$)

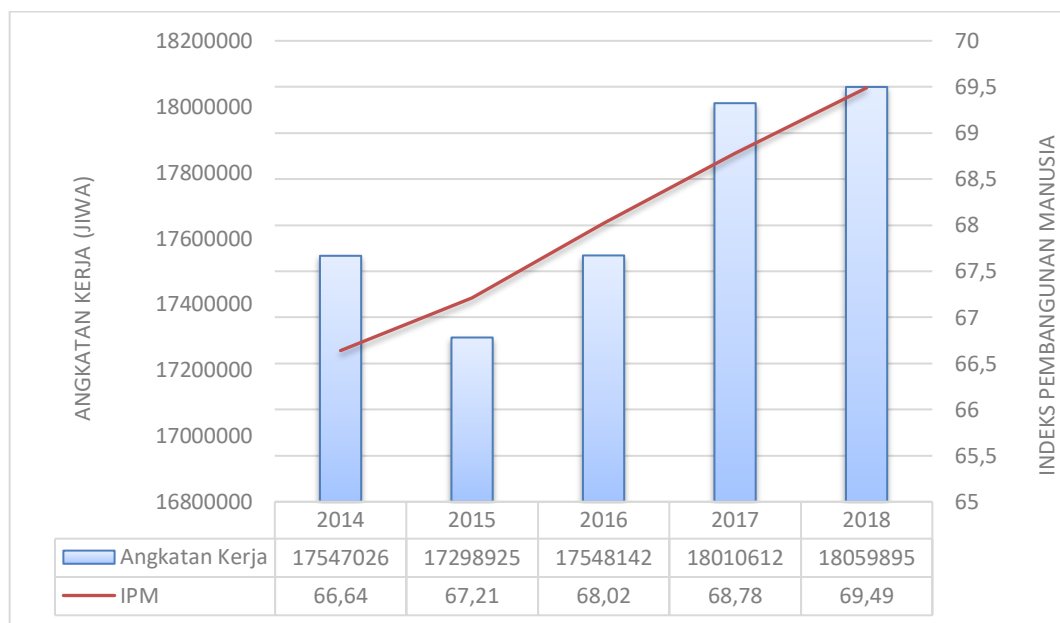
N O	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Cilacap	8.704.019,4	11.801,4	2.407,4	3.001.954,9	9.296,50
2	Kabupaten Banyumas	7.791,4	828	8.650	14.934,3	773,50
3	Kabupaten Purbalingga	1.200	7.000	80.066	14.284,7	12.358,20
4	Kabupaten Banjarnegara	0	3.000	7.000	2.021,7	23,10
5	Kabupaten Kebumen	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Purworejo	0	0	1.592,6	6.692,6	0
7	Kabupaten Wonosobo	0	0	0	3.692,6	1,50
8	Kabupaten Magelang	3.132,1	1.168	4.160	4.250	2.733,00
9	Kabupaten Boyolali	23.929,9	41.731,4	8.649	26.250	15.263,20
10	Kabupaten Klaten	12.246,6	7.080	11.278,8	17.179,6	3.091,40
11	Kabupaten Sukoharjo	31.988	5.100	355.912,2	17.835,9	53.681,80
12	Kabupaten Wonogiri	12.712,3	2.576	0	4.508,6	121,70
13	Kabupaten Karanganyar	14.875,7	3.460	777,8	40.017	7.522,30
14	Kabupaten Sragen	0	960	0	41.000	5.105,90
15	Kabupaten Grobogan	265.248,3	2.500	67.624,4	8.950	42.752,30
16	Kabupaten Blora	1.500	0	81.737	902,3	4.234,90
17	Kabupaten Rembang	347.075,5	3.258,5	12.311,1	25.895,1	16.643,30
18	Kabupaten Pati	9.232,1	1.800	0	1.000	163,60
19	Kabupaten Kudus	0	200	21.000	3.145	114,00
20	Kabupaten Jepara	99.734,3	4.206.136	260.845,8	86.117,1	915.787,30
21	Kabupaten Demak	15.043,1	9.346	144.088,3	22.005,4	21.462,00

N O	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
22	Kabupaten Semarang	77.575,8	125.476,6	83.005,9	41.811,2	18.850,20
23	Kabupaten Temanggung	3.301,9	1.200	39.893,1	0	9.093,40
24	Kabupaten Kendal	19.700	16.950	179.080	4.666,7	60.484,90
25	Kabupaten Batang	1.320,8	11.510	65.180	5.850	1.009.895,10
26	Kabupaten Pekalongan	0	270.800	1.185,2	24.300	0
27	Kabupaten Pemasang	1.200	19.500	65.180	6.185	1.152,10
28	Kabupaten Tegal	14.905,7	9.874,3	110.798,4	124.315	13.391,80
29	Kabupaten Brebes	25.941,4	449.750	103.412,9	82.102,8	91.202,50
30	Kota Magelang	807,6	0	0	0	58,20
31	Kota Surakarta	7.212,6	2.888	48.617,9	3.685	89,40
32	Kota Salatiga	4.991,7	50.578	1.914,8	8.830	9.679,30
33	Kota Semarang	599.479,6	150.696,1	256.611,3	138.315,5	46.011,60
34	Kota Pekalongan	1.670	828	0	0	597,00
35	Kota Tegal	1.200	1.000	1.500	1.895,5	1.068,30
	TOTAL	10.309.035,8	5.418.996,3	2.024.479,9	3.784.593,5	2.372.703,30

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah

Persebaran investasi PMA yang ada di Provinsi Jawa Tengah tampak juga tidak begitu merata, Kabupaten Cilacap menjadi daerah paling tinggi menerima akumulasi modal sebesar 50,85% dari total investasi PMA yang ada di Jawa Tengah selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Kemudian Kab. Jepara sebesar 23,68%, sementara Kabupaten/Kota lainnya masih sangat kekurangan alokasi investasi PMA. Keterkaitan wilayah yang memiliki investasi yang tinggi dengan wilayah yang memiliki sedikit investasi akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan berbagai masalah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah, salah satunya melihat perkembangan ketersediaan sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia sebagai *man power* atau motor penggerak roda perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2014-2018 sebagai berikut.



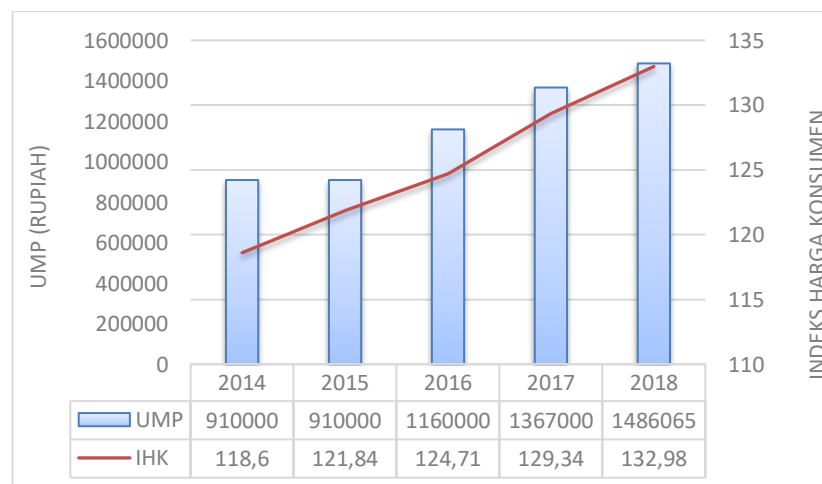
Gambar 1.2. Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2019, diolah

Data gambar 1.2 menunjukkan ketersediaan angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan pada tahun 2015 diiringi perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dimaknai bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami perbaikan. Ketersediaan angkatan kerja dan kualitas angkatan kerja yang baik dapat mempengaruhi masuknya investasi, karena seorang investor akan membutuhkan

angkatan kerja lokal atau asli daerah dengan kualitas yang baik dalam menjalankan perusahaannya.

Selain itu investor juga mempertimbangkan beban gaji yang akan dikeluarkannya untuk memperoleh angkatan kerja. Dengan adanya kebijakan UMR yang di atur dalam PP No. 78 menyatakan bahwa besarnya UMR tidak boleh dibawah UMP, menjadi faktor yang mempengaruhi seorang investor dalam memilih daerah. Apabila dengan daerah menetapkan UMR yang tinggi tentu akan menurunkan keuntungannya. Tidak hanya beban gaji investor juga dapat melihat dari kemampuan beli masyarakat di suatu daerah, berikut perkembangan UMP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.



Gambar 1.3. Upah Minimum Provinsi dan Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2019, diolah

Pada data gambar 1.3 menunjukkan perkembangan upah minimum provinsi terus mengalami peningkatan menyebabkan peningkatan pula pada standar upah minimum regional seperti pada peraturan PP No. 78. Sedangkan perkembangan

Indeks Harga Konsumen pada tahun 2014 sampai tahun 2018 kemampuan beli masyarakat selalu mengalami peningkatan. Selain dari ketersediaan angkatan kerja, kualitas angkatan kerja, upah minimum dan kemampuan daya beli diduga juga dapat mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran daerah yang diprosikan pada realisasi belanja modal yang memiliki fungsi untuk perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dapat memberikan pengaruh kepada seorang investor untuk melakukan investasi pada daerah tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Provinsi Jawa Tengah memiliki ketimpangan pembangunan yang tergolong tinggi pada tahun 2018 dihitung menggunakan Indeks Williamson dengan nilai 0,64. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang tertinggal agar jarak ketimpangan tidak begitu tinggi antardaerah.
2. Jumlah investasi yang masuk di Jawa Tengah tergolong cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, namun investor cenderung menginvestasikan dananya ke daerah yang kaya, karena lebih aman dan memberikan keuntungan yang besar dalam hal ini daerah miskin akan semakin sulit untuk berkembang menjadi daerah kaya dan ketimpangan semakin melebar.

3. Ketimpangan investasi menjadi masalah yang perlu dikaji karena dapat menghambat pembangunan daerah.
4. Mengetahui determinan investasi yang terbentuk di Provinsi Jawa Tengah, daerah yang masih kekurangan investasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Cakupan Masalah

Cakupan atau batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji lima variabel, yaitu variabel angkatan kerja, indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum regional (UMR), indeks harga konsumen (IHK) sebagai variabel bebas, dan investasi PMA dan PMDN sebagai variabel terikat.
2. Objek penelitian ini adalah terbatas hanya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Angkatan Kerja (AK) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh Angkatan Kerja (AK) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Investasi menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang masalah-masalah pengembangan investasi, khususnya di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat maupun peneliti lain sebagai perkembangan penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten./Kota tentang rekomendasi investasi yang berkaitan dengan hasil penelitian. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan seperti pemerintah dan investor.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya mengenai analisis tipologi investasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah antara lain seperti: (a) pemetaan kebutuhan investasi di Provinsi Jawa Tengah, (b) penambahan analisis tipologi klassen dan (c) faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian terdahulu oleh (Sarungu, 2008:63) mengenai pola penyebaran spasial investasi di Indonesia, dengan pembagian wilayah antarprovinsi, antarprovinsi dalam wilayah pulau dan kepulauan, antarprovinsi dalam wilayah kawasan, dan antarprovinsi dalam wilayah kepemilikan SDA. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data time series tahunan dari 1985-1995 dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis Koefisien Entropy Theil dan Koefisien Deviasi Logaritmik rata-rata.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory)

Pada bulan April 1946, Evsey Domar menerbitkan sebuah artikel tentang pertumbuhan ekonomi yang berjudul “*Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment*”. Artikel tersebut tidak membahas pertumbuhan ekonomi jangka panjang, namun membahas hubungan antara resesi jangka pendek dan investasi di Amerika Serikat. (Easterly, William, 1997:2) menjelaskan tentang bagaimana model Domar (Harrod-Domar) bertahan dari krisis pada tahun 1950-an. Para ekonom menerapkannya ke negara-negara miskin dari Albania ke Zimbabwe untuk menentukan tingkat investasi “wajib” demi tingkat pertumbuhan. Perbedaan antara investasi yang dibutuhkan dan tabungan mereka sendiri merupakan kesenjangan pembiayaan. Donor untuk mengisi *financing gap* dengan bantuan asing untuk mencapai target pertumbuhan. Hal ini bukan tentang hubungan jangka panjang antara investasi dan pertumbuhan, namun tentang model yang menjanjikan pertumbuhan negara-negara miskin dalam jangka pendek melalui bantuan dan investasi.

Pendekatan Domar terhadap pertumbuhan menjadi populer karena memiliki prediksi yang sederhana yaitu, pertumbuhan PDB akan sebanding dengan pengeluaran investasi dalam PDB (Easterly, William, 1997:2).

Pertumbuhan ekonomi paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009:222). Tingkat pertumbuhan ekonomi harus

membandingkan pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai riil, pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Dengan membedakan atau selisih antara PDRB riil tahun tertentu dengan PDRB riil tahun sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi sering kali menggunakan nilai riil dimaksudkan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga barang dan jasa yang diproduksi sehingga menggambarkan perubahan kuantitas produksi.

Harrod –Dommar berpendapat bahwa setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasional untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Investasi dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, investasi baru yang merupakan tambahan terhadap cadangan modal. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi (Tarigan, 2005:49) :

1. Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung ($MPS=s$) adalah konstan,
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*),
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

$$g = k = n$$

Keterangan :

g : *Growth* (tingkat pertumbuhan *output*)

k : *Capital* (tingkat pertumbuhan modal)

n : Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan tersebut (Tarigan, 2005:49).

2.2. Konsep Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan merupakan ketidakmerataan pendapatan pada masyarakat suatu wilayah tertentu dengan wilayah lain. Ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tersebut. Salah satunya adalah alokasi investasi yang tidak merata diseluruh wilayah karena investor cenderung memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, asuransi dan sumber daya manusia. Sedangkan daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar.

Sjafrizal (2008:119) dalam bukunya membahas ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah, antara lain :

1. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan etos kerja yang dimiliki daerah bersangkutan. Hal ini akan

berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah tersebut.

2. Alokasi Investasi

Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah hal itu tidak dapat kita sangkal lagi. Oleh karenanya suatu daerah yang mendapat alokasi investasi yang besar dari pemerintah atau yang dapat menarik lebih banyak investasi swasta cenderung tingkat pertumbuhan daerahnya lebih cepat.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Terhambatnya mobilitas barang dan jasa juga akan mendorong ketimpangan pembangunan wilayah, alasannya karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan demikian juga dengan tenaga kerja.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi

Terjadinya konsentrasi tentu akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai contoh, adanya ketersediaan sumber daya alam yang melimpah pada daerah tertentu kemudian didukung dengan fasilitas yang memadahi dan kondisi sumber daya manusia yang berkualitas.

2.3. Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan antarwilayah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sosial budaya antar wilayah. Mydral dalam (Rahmawati, 2014:793) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Sebab utama ketimpangan regional menurut Mydral kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar.

Hirschman dalam Sjafrizal (2008:127) juga membagi perbedaan antara daerah miskin dan kaya sebagai berikut :

- a. *Trickling down effect* yaitu proses penetesan ke bawah sebagai dampak yang baik karena perbedaan antara daerah kaya dan miskin semakin menyempit;
- b. *Polarization effect* yaitu proses pengkutuban sebagai dampak yang buruk karena perbedaan antara daerah kaya dan miskin semakin jauh.

2.4. Teori Lokasi

Teori lokasi merupakan konsep ilmu dengan cakupan analisa yang cukup luas meliputi analisa menyangkut lokasi kegiatan ekonomi. Walter Christaller menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah, dalam modelnya ini Christaller menggunakan suatu sistem geometri angka 3 yang ditetapkan secara arbiter memiliki peran yang sangat berarti inilah yang disebut sistem $K = 3$ dari Christaller (Tarigan, 2005:124).

Sehubungan dengan hal ini, dalam buku (Sjafrizal, 2008) teori lokasi dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian besar yaitu :

1. *Bid Rent Theories* dipelopori oleh Von Thunen berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada kemampuan membayar harga tanah (*bid-rent*) yang berbeda dengan harga pasar tanah (*land-rent*). Berdasarkan hal ini lokasi kegiatan ekonomi ditentukan oleh nilai *bid-rent* yang tertinggi.
2. *Least Cost Theories* yaitu kelompok teori lokasi yang berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip biaya minimum (*Least Cost*). Lokasi yang optimal adalah lokasi dimana jumlah biaya produksi dan ongkos angkut yang paling kecil. Bila hal ini terpenuhi maka tingkat keuntungan perusahaan akan menjadi maksimum. Teori lokasi ini dipelopori oleh Alfred Weber.
3. *Market Area Theories* yaitu teori lokasi yang dipelopori oleh August Losch. Berdasarkan analisa pemilihan lokasi pada kegiatan ekonomi dengan prinsip pasar (*Market Area*) terbesar yang dapat dikuasai perusahaan. Luas pasar tersebut adalah mulai dari lokasi pabrik sampai ke lokasi konsumen yang membeli produk perusahaan yang bersangkutan. Bila pasar yang dikuasai besar maka keuntungan perusahaan akan menjadi maksimum.

Keputusan pemilihan lokasi merupakan keputusan dimana aktivitas ekonomi seperti produksi atau pemberian jasa dapat berjalan dengan optimal. Secara horizontal pengambilan keputusan dalam pemilihan lokasi untuk

memperoleh keunggulan dalam *market seeking*. Sementara itu, secara vertikal perusahaan juga berupaya untuk dapat memperoleh keunggulan biaya produksi dengan cara mengakses sumber daya yang lebih murah *resource seeking* (Wadhwa, Kavita, 2011:220).

2.5. Investasi

Menurut Sadono, dalam (Hermayeni, 2015:1) investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi berbeda dengan menabung, menyimpan uang dalam bank seperti tabanas, deposito dan sebagainya masih tergolong menabung, sedangkan tabungan baru dapat dikatakan menjadi investasi jika dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk pembuatan pabrik atau menciptakan produksi. Ditinjau dari pelakunya kegiatan investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni penanaman modal dalam negeri yaitu investasi yang dilakukan oleh penduduk negara itu sendiri dan penanaman modal asing yaitu penanaman modal yang dilakukan dari penduduk diluar negara itu atau penduduk negara lain.

Sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 25/2007 tentang penanaman modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal meliputi: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (b) menciptakan lapangan pekerjaan; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (e) meningkatkan kapasitas kemampuan teknologi nasional; (f) mendorong pengembangan ekonomi

kerakyatan; (g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan (h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penambahan persediaan barang modal, yang secara langsung akan meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang meningkat akan mempercepat pertumbuhan tingkat produksi suatu wilayah yang sedang berkembang (Akhmad, 2012:6).

2.6. Analisis Tipologi Klassen

Analisis tersebut untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi ekonomi daerah atau tipologi pertumbuhan. Lebih lanjut (Sjafrizal, 1997), membedakan empat karakteristik pertumbuhan daerah, yaitu : (1) daerah maju dan bertumbuh cepat (*rapid growth region*); (2) daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*); (3) daerah sedang bertumbuh (*growing region*) dan (4) daerah relatif tertinggal (*stagnant region*). Sementara itu (Kuncoro, 1997) dalam (Sutikno, 2007:5), menggunakan alat analisis tersebut untuk menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan membandingkan ratio pendapatan perkapita dan ratio pertumbuhan. Dalam penelitiannya perekonomian propinsi di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. 1) *Low growth, high income*, 2) *High growth, high income*, 3) *High growth, low income* dan 4) *Low growth, low income*.

2.7. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Banyak sedikitnya angkatan kerja tergantung komposisi penduduk dalam suatu wilayah. Kenaikan jumlah penduduk terutama penduduk

golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi (*man power*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam model sederhana pertumbuhan ekonomi jumlah angkatan kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah produktif. Dengan meningkatnya produktivitas angkatan kerja diharapkan akan meningkatkan produksi. Produktivitas angkatan kerja akan sangat berperan penting dalam perkembangan investasi, semakin tinggi produktivitas akan semakin baik perkembangan investasi. Begitu juga sebaliknya angkatan kerja yang tidak produktif akan mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi yang akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Kecenderungan peningkatan upah minimum yang tinggi serta ketidakpastian hubungan antara perusahaan kedua masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan dengan produksi menjadi tinggi (Sitompul, 2007). Ketersediaan angkatan kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Angkatan kerja menjadi faktor yang cukup penting dalam usaha meningkatkan investasi. Hal ini karena angkatan kerja dipandang sebagai faktor produksi yang mampu meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya.

2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia, secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Perhitungan IPM berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen indikator pembangunan yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya

bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. IPM dibangun melalui tiga pendekatan dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor didalamnya. Indeks pembangunan manusia memiliki cakupan secara spesifik, seperti mengukur keadaan perkembangan manusia secara lebih terperinci sehingga memberikan gambaran spesifik tentang keadaan pada kurun waktu tertentu untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengalokasian dana untuk pembangunan di daerah-daerah (UNDP, 2004).

United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Indeks*. Dengan adanya peningkatan IPM dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (UNDP, 1999). Para investor akan melihat dan sangat mempertimbangkan kualitas dari sumber daya manusia di suatu wilayah, pemilihan angkatan kerja yang berkualitas akan sangat mempengaruhi output kegiatan ekonomi. Oleh karena itu IPM dipandang menjadi faktor yang cukup menentukan dalam mempengaruhi investasi.

2.9. Upah Minimum Regional

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Menurut (Sitompul, 2007) dalam karya tesisnya mengatakan bahwa adanya pandangan ekonomi

kapitalis terhadap angkatan kerja tidak terlepas dari faktor produksi, kecenderungan angkatan kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi ketika yang lain memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap angkatan kerja sebagaimana input tanah mendapatkan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga.

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional. Dari definisi diatas, maka terlihat dua unsur penting, yaitu :

1. Upah permulaan merupakan upah terendah yang harus diterima oleh pekerja pada waktu pertama kali dia diterima bekerja;
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara minimum, yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya.

Upah seringkali dianggap sebagai beban produksi oleh perusahaan, sebisa mungkin menekan biaya beban upah tenaga kerja agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal .Upah minimum dianggap sebagai beban biaya oleh para pengusaha, semakin tinggi upah minimum suatu wilayah menjadikan pertimbangan bagi pengusaha maupun investor untuk menanamkan investasinya. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam memberikan stimulus kebijakan untuk menarik investor.

2.10. Indeks Harga Konsumen

Harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa (Mankiw, 2003). Ketika harga-harga barang atau jasa pada suatu komoditi mengalami kenaikan dapat dikatakan telah terjadi inflasi pada suatu

kelompok tersebut. IHK dapat dijadikan sebagai ukuran inflasi dan juga merupakan indikator stabilitas ekonomi dalam arti bahwa stabilnya perekonomian.

Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks dari harga yang dibayar konsumen atau masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan jasa (komoditas). Ada 7 kelompok komoditi yang termasuk dalam Indeks Harga Konsumen terlihat pada Tabel 2.1. Kelompok dan Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kelompok dan Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen

No	Kelompok	Sub Kelompok
1	Bahan Makanan	Padi-padian, umbi-umbian dan hasil-hasilnya, daging dan hasil-hasilnya, ikan segar, ikan diawetkan, telur, susu dan hasilnya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak, bahan makanan lainnya
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	Makanan jadi, minuman non alkohol, tembakau dan minuman beralkohol
3	Perumahan	Biaya tempat tinggal, bahan bakar, penerangan, air, perlengkapan rumah tangga, penyelenggaraan rumah
4	Sandang	Sandang laki-laki, sandang wanita, sandang anak-anak, barang pribadi dan sandang lainnya
5	Kesehatan	Jasa kesehatan, obat-obatan, jasa perawatan jasmani dan kosmetik
6	Pendidikan rekreasi dan olahraga	Jasa pendidikan, kursus-kursus/pelatihan, perlengkapan/peralatan pendidikan, rekreasi, olahraga
7	Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan	Transportasi, komunikasi, pengiriman, sarana dan penunjang transportasi, jasa keuangan

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Menurut Bank Indonesia (2016) IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayarkan oleh

konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) pada umumnya dikonsumsi masyarakat. IHK diduga dapat mendorong investasi karena tingginya kemampuan membeli konsumen berdampak langsung pada pendapatan yang akan diperoleh suatu perusahaan.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Sarungu, 2008) dengan judul “Pola Penyebaran Spasial Investasi di Indonesia: Sebuah Pelajaran Dari Masa Lalu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis Koefisien Entropy Theil dan Koefisien Deviasi Logaritmik rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan penyebaran investasi perkapita antarprovinsi di Indonesia cenderung semakin menyebar dengan pola penyebaran yang berbentuk U terbalik, Penyebaran investasi perkapita antarprovinsi dalam wilayah Pulau dan kepulauan di Indonesia menunjukkan perbedaan antar pulau dan kepulauan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mayanti, Susi, 2015) dengan judul “Tipologi Daerah Berdasarkan Investasi, Penyaluran Kredit, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2010)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh investasi, penyaluran kredit, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan regional. Hasil penelitiannya yaitu tipologi daerah bagi 25 Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2004-2010 yang

dikembangkan dari analisis Tipologi Klassen disimpulkan bahwa Kab. Karawang, Kab. Bekasi dan Kota Bandung tergolong pada wilayah maju dan tumbuh pesat. Kab. Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Cimahi dan Kab. Bogor tergolong pada wilayah jenuh. Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok sebagai wilayah berkembang potensial, sedangkan kabupaten lainnya tergolong tertinggal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aswandi, Hairul, 2002) dengan judul “Evaluasi penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan tahun 1993-1999”. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi logistik multinomial sebagai berikut :

$$D4 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

D4 = Klasifikasi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, yaitu :

1 = daerah cepat maju dan cepat tumbuh

2 = daerah maju tapi tertekan

3 = daerah berkembang cepat

4 = daerah relatif tertinggal

X1 = Pertumbuhan PDRB

X2 = PDRB perkapita

X3 = Spesialisasi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Timur hanya mengacu pendapatan perkapita dan sub sektor unggulan, sedangkan pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan. Hasil analisis spesialisasi

regional menunjukkan bahwa kemampuan kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian (sektoral) dengan daerah lainnya masih lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Na & Lightfoot, 2006) dengan judul “*Determinants of Foreign direct investment at the regional level in China*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk mengidentifikasi faktor pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap *FDI* di regional China. Hasil penelitian menunjukkan tiga variabel yang signifikan terhadap *FDI* pada 30 wilayah di China. *Market size*, *Quality of labor* dan *Wage* berpengaruh negatif terhadap *FDI*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Coughlin & Segev, 2000) dengan judul “*Foreign Direct Investment in China : A Spatial Econometric Study*”. Dalam penelitiannya mengenai determinan lokasi dari *FDI* di provinsi China, menunjukkan hasil bahwa *Economic Size*, *Average Productivity* dan *Coastal Location* berpengaruh positif dengan determinan *FDI*, dan *Average Wage*, *illiteracy rate* berpengaruh negatif. Serta dua transportasi infrastruktur tidak berpengaruh signifikan secara statistik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, Eni dan Fatimah, 2007) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1980-2002”. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel sukubunga, inflasi, PDRB dan tenaga kerja terhadap investasi dalam negeri. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model koreksi kesalahan Engle-Granger (EG-ECM). Hasil penelitian ini yaitu hasil estimasi OLS dengan model koreksi kesalahan E-G menunjukkan bahwa variabel yang

berpengaruh dan signifikan secara statistik dalam jangka pendek adalah investasi dalam negeri tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang negatif terhadap investasi dalam negeri. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh dan signifikan secara statistik adalah variabel suku bunga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap investasi dalam negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliadi, Imamudin, 2012) dengan judul “Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis yaitu analisis kesenjangan investasi, analisis regresi dan analisis kesenjangan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan investasi di Provinsi Gorontalo investasi PMDN relatif tinggi pada tahun 2001 kemudian turun pada tahun 2002 kemudian meningkat sampai dengan tahun 2006 dengan nilai 1.170.419, sedangkan kesenjangan investasi PMA berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 besarnya gap -81,1 kemudian meningkat menjadi -6.208,7 pada tahun 2007.

2.12. Kerangka Pemikiran

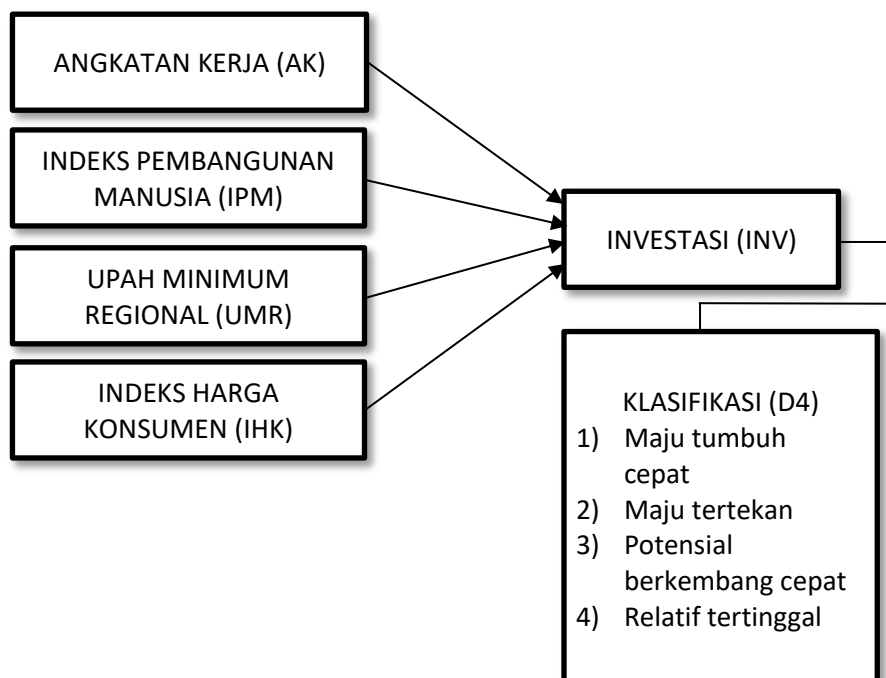
Ketimpangan antar wilayah akan terlihat nyata apabila dilakukan identifikasi posisi perekonomian melalui Tipologi Klassen, yang membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita. Tetapi dalam penelitian ini indikator utama yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan investasi per kapita sebagai sumbu horizontal.. Daerah yang diamati dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : daerah maju tumbuh pesat (*high growth and high investment*), daerah maju tapi tertekan

(*low growth but high investment*), daerah potensial berkembang cepat (*high growth but low investment*), daerah relatif tertinggal (*low growth and low investment*) (Mayanti, Susi, 2015:35).

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli telah melakukan penelitian bahwa investasi atau akumulasi modal secara signifikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Investor cenderung menginvestasikan dananya ke daerah yang kaya karena lebih aman dan memberikan keuntungan yang besar dalam hal ini daerah miskin akan semakin sulit untuk berkembang dan menimbulkan ketimpangan investasi antardaerah semakin melebar. Faktor ketersediaan angkatan kerja, kualitas angkatan kerja, beban upah dan daya beli konsumen dianggap dapat mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan investasi menjadi masalah yang perlu dikaji karena dapat menghambat pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis



2.1. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara peneliti mengenai hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi di dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. H_1 = Terdapat pengaruh angkatan kerja terhadap investasi menurut tipologi klasen di Jawa Tengah.
2. H_2 = Terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap investasi menurut tipologi klasen di Jawa Tengah.
3. H_3 = Terdapat pengaruh upah minimum regional terhadap investasi menurut tipologi klasen di Jawa Tengah.
4. H_4 = Terdapat pengaruh indeks harga konsumen terhadap investasi menurut tipologi klasen di Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada investasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2018 menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Angkatan Kerja (AK) berpengaruh terhadap investasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2018.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap investasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2018.
3. Variabel Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh terhadap investasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2018.
4. Variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh terhadap investasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2018.
5. Pada klasifikasi daerah maju tumbuh cepat investasi dipengaruhi oleh angkatan kerja dan upah minimum regional, lalu untuk klasifikasi daerah maju tertekan hanya angkatan kerja yang berpengaruh terhadap investasi, sedangkan klasifikasi daerah potensial berkembang cepat investasi dipengaruhi oleh angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia.
6. Fungsi logit untuk model regresi logistik multinomial untuk jenis klasifikasi daerah untuk investasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

$$g_1(x) = -1,689 + 0,000AK_1 + \mathbf{0,135IPM}_z + 0,000UMR_3 \\ - \mathbf{0,138IHK}_4$$

$$g_2(x) = -7,452 + 0,000AK_1 + \mathbf{0,084IPM}_z + \mathbf{0,000UMR}_3 \\ - \mathbf{0,036IHK}_4$$

$$g_3(x) = -6,358 + \mathbf{0,000AK}_1 + 0,126IPM_z + \mathbf{0,000UMR}_3 \\ - \mathbf{0,027IHK}_4$$

*penulisan tebal untuk variabel yang tidak signifikan

Fungsi logit di atas dapat digunakan untuk menghasilkan peluang masing-masing kategori daerah investasi yaitu sebagai berikut:

$$\pi_1(x) = \frac{\exp g_1(-1,692)}{1 + \exp g_1(-1,692) + \exp g_2(-7,404) + \exp g_3(-6,259)x} = 0,155$$

$$\pi_2(x) = \frac{\exp g_2(-7,404)}{1 + \exp g_1(-1,692) + \exp g_2(-7,404) + \exp g_3(-6,259)x} = 0,000513$$

$$\pi_3(x) = \frac{\exp g_3(-6,259)}{1 + \exp g_1(-1,692) + \exp g_2(-7,404) + \exp g_3(-6,259)x} = 0,001612$$

$$\pi_4(x) = \frac{1}{1 + \exp g_1(-1,692) + \exp g_2(-7,404) + \exp g_3(-6,259)x} = 0,843$$

Keterangan:

$\pi_1(x)$ = fungsi probabilitas untuk kategori investasi menuju tumbuh cepat.

$\pi_2(x)$ = fungsi probabilitas untuk kategori investasi maju tertekan.

$\pi_3(x)$ = fungsi probabilitas untuk kategori investasi potensial berkembang pesat.

$\pi_4(x)$ = fungsi probabilitas untuk kategori investasi relatif tertinggal.

Model yang dihasilkan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 47,4% dan model tersebut telah sesuai namun karena nilai klasifikasi memiliki nilai

yang rendah maka ada indikasi variabel prediktor dan jumlah data yang digunakan relatif sedikit.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran maupun rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi melalui kebijakan-kebijakan yang memudahkan dan pro investasi diiringi meningkatkan sektor unggulan daerah dan penguatan spesialisasi tiap-tiap daerah.
2. Untuk para investor, masih banyak daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang namun masih rendah akan investasi. Peluang ini dapat dilihat para investor dengan menanamkan investasinya ke daerah yang memiliki potensi berkembang namun masih belum banyak investasi yang masuk.
3. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memodelkan menggunakan metode lain yang kemungkinan dapat menghasilkan model yang sesuai dengan nilai ketepatan klasifikasi yang tinggi. Selain itu, pada penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel prediktor yang lebih lengkap yang tidak digunakan pada penelitian ini yang kemungkinan dapat meningkatkan ketepatan klasifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Kuncoro. (2001). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik, Cetakan Pertama*. Bandung: ALFABETA.
- Akhmad, S. (2012). Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aswandi, H. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan, *17*(1), 27–45.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2019*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2016). *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta: available online at www.bi.go.id.
- Coughlin, C. C., & Segev, E. (2000). Foreign direct investment in China: A Spatial Econometric Study. *World Economy*, 23(1), 1–23.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. (2019). Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2014-2018. Semarang: DPMPTSP.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Easterly, W. (1997). The Ghost of Financing Gap: How the Harrod-Domar Growth Model Still Haunts Development Economics. *Policy Research Working Paper*, 1807, 1–30.
- Field, A. (2009). *Discovering Statistics Using SPSS Third Edition*. London: SAGE Publications Ltd.

- Hermayeni, S. (2015). Analisis Ketimpangan Investasi Antar Provinsi Di Pulau Sumatera dan Kalimantan Tahun 2005-2013. *Jom FEKON*, 2(1), 1–10.
- Hidayat, L., & Salim, S. (2013). Analisis Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jimkes*, 1(2), 159–168.
- Irzan, H. A. (2019). *Analisis Pengaruh Indeks Harga Konsumen, Jumlah Penduduk, Nilai Tukar dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Investasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 1996-2016*.
- Karlina, B. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 6(1), 2252–6226.
- Kemensetneg. (2016). *Paket Kebijakan Ekonomi 11, Dana Investasi Real Estate*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- _____. (2013). *“Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maryaningsih, N. (2014). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1), 61–98.
- Mayanti, S. (2015). Tipologi Daerah Berdasarkan Investasi, Penyaluran Kredit, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004 – 2010). *EKO-REGIONAL*, 10(1), 32–40.

- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Na, L., & Lightfoot, W. S. (2006). Determinants of foreign direct investment at the regional level in China. *Journal of Technology Management in China*, 1(3), 262–278. <https://doi.org/10.1108/17468770610704930>
- Prasetyo. (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Qahfi, A. S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmawati. (2014). Perkembangan Industri Di Pedesaan Dan Perubahan Karakteristik Wilayah Desa Di Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 792–806.
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. *World Development*, 28(2), 197–219. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00131-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00131-X)
- Rizal, Y. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Kurs Terhadap Investasi Dalam Negeri. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 30–37.
- Sarungu. (2008). Pola Penyebaran Spasial Investasi di Indonesia : Sebuah Pelajaran Dari Masa Lalu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 61–71.
- Setyowati, Eni; Fatimah, S. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1980-2002. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 62–84.

- Sirojuzilam. (2008). Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kab. Singkil. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 28–42.
- Sitompul, N. L. (2007). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara. *Tesis*.
- Situmorang. (2014). Pengaruh Motivasi terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal dengan Pemahaman Investasi dan Usia sebagai Variabel Moderat. *Jom FEKON*, 1(2), 1–18.
- Sjafii. (2009). Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 59–76.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Yogyakarta: LP3ES.
- _____. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Soekarni. (2010). Peta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia, 1–20.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutawijaya, A. (2010). Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(1), 14–27.
- Sutikno. (2007). Analisis Potensi Dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (Swp) Kabupaten Malang.

Journal of Indonesian Applied Economics, 1(1), 1–17.

Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

UNDP. (1999). *Human Development Report: Human Development Indeks*. New York: United Nations Development Programme.

UNDP. (2004). *Human Development Report: The Economics of Democracy*. New York: United Nations Development Programme.

Wadhwa, K. (2011). Foreign Direct Investment into Developing Asian Countries: The Role of Market Seeking, Resource Seeking and Efficiency Seeking Factors. *International Journal of Business and Management*, 6(11), 219–226.

Wahyuntari. (2018). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 296–305.

Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.

_____. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(2), 276–287.